

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT**

1. Nama Organisasi : Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Visi : Menjadi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yang Prima Di Jawa Barat Tahun 2018
3. Misi :
 1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelayanan kesejahteraan sosial
 2. Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 3. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial
 4. Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
Misi Pertama : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelayanan kesejahteraan sosial				
Misi Keempat : Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Populasi Keluarga Miskin}} \times 100$	Bidang Pemberdayaan Sosial + Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial + Bidang Penanganan Fakir Miskin

	Prosentase Penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{100} \times \text{Populasi Penyandang Disabilitas}$	Bidang Rehabilitasi Sosial + UPTD
	Prosentase Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Populasi Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi Sosial + UPTD
	Prosentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{100} \times \text{Populasi Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik}$	Bidang Rehabilitasi Sosial + UPTD
	Prosentase Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Populasi Wanita Tuna Susila}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi Sosial + UPTD
	Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Populasi Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi Sosial + UPTD

		Prosentase Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Populasi Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi Sosial + UPTD
		Prosentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Populasi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi Sosial
		Prosentase Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Bekas Warga Lembaga Binaan Masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Populasi Bekas Warga Binaan Masyarakat}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi Sosial
		Prosentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Adat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Populasi Komunitas Adat Terpencil}} \times 100$	Bidang Pemberdayaan Sosial
		Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Populasi Korban Bencana}} \times 100$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial + UPTD

Misi Kedua : Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Misi Ketiga : Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial

Misi Keempat : Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

2.	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	Prosentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah dibina dan aktif dalam penanganan PMKS: a. Berbadan Hukum b. Memperoleh Ijin c. Melaksanakan pelayanan sesuai standarisasi kelembagaan	Bidang Pemberdayaan Sosial
		Prosentase Kader PSKS (PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS	PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping yang mendapatkan pembinaan dan aktif: a. Terdaftar pada Dinas Sosial b. Telah memperoleh pembinaan c. Masih aktif melakukan aktivitas sesuai tugasnya	Bidang Pemberdayaan Sosial
		Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Masyarakat peserta kegiatan penyuluhan sosial yang meningkat pemahaman dan kesadarannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial: Masyarakat peserta kegiatan penyuluhan yang berdasarkan hasil pre test dan post tes mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial

		Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	<p>Masyarakat peserta kegiatan penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial yang meningkat kesadarannya terhadap nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial:</p> <p>Masyarakat peserta kegiatan penumbuhan kesadaran terhadap nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial yang berdasarkan hasil pre test dan post tes mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.</p>	Bidang Pemberdayaan Sosial
		Prosentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	<p>Dunia Usaha Peduli Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif:</p> <p>a. Terdaftar pada Dinas Sosial b. Telah memperoleh pembinaan c. Masih aktif melakukan aktivitas sesuai tugasnya</p>	Bidang Pemberdayaan Sosial

Cimahi,



**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT,**

Drs. H. ARIFIN HARUN KERTASAPUTRA
Pembina Utama Madya
NIP. 19580206 198303 1 007